

PEMBANGUNAN POLITIK DAN TEORITIS

Harun Umar

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional

Email : heron9300@gmail.com

Abstract

One of the developments in political science is the emergence of political development studies as a separate field of study, in addition to other fields of study such as political theories, political institutions, parties, groups and public opinion, and international relations. Western scholars develop this study in their efforts to understand the socio-political changes in developing countries. Therefore, the context of political development tends to be aimed at developing countries with the assumption that rationalization, integration and democratization have not yet been implemented in these countries.

Keywords: *Modernization, Political Development, Economic Dependence.*

Pendahuluan

Sejumlah literatur kajian para teoritis ortodoks maupun radikal hadir dengan subjek utama pembangunan (*development*) dan keterbelakangan (*underdevelopment*). Kompleksitas isu-isu soal literatur pembangunan. Dalam upaya memperjelas isu-isu tersebut, ada enam tema umum yang mengalir dalam upaya mengkaji masalah tersebut, antara lain :

- A. Pembangunan Politik
- B. Pembangunan dan nasionalisme
- C. Modernisasi
- D. Keterbelakangan
- E. Ketergantungan
- F. Klasifikasi Teori Ketergantungan
- G. Pendekatan Terhadap Teori Ketergantungan

A. Pembangunan Politik

Salah satu perkembangan dalam ilmu politik adalah munculnya studi pembangunan politik sebagai bidang kajian tersendiri, disamping bidang kajian lainnya seperti : 1. Teori-teori politik, 2. Lembaga-lembaga politik, 3. Partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, 4. Hubungan internasional. Para sarjana barat mengembangkan kajian ini dalam usaha

mereka memahami perubahan sosial politik di Negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di negara-negara tersebut belum berjalan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi.

Menurut Huntington dan Dominguez konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, deveriatif, teologis dan fungsional: 1. Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya. 2. Pembangunan politik dalam arti derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. 3. Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara misa, misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional atau lebih bersifat prosedural.

Pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. “Kepustakaan atau literatur pembangunan politik menekankan dimensi politik dari pembangunan dan kecenderungan membedakan pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Literatur ini dikelompokkan ke dalam tiga tipe: a. yang satu berasosiasi dengan gagasan-gagasan demokrasi, b. berfokus pada aspek-aspek pembangunan dan perubahan politik, dan c. menguji krisis konsekuensi-konsekuensi pembangunan politik.

Secara pendekatan tradisional para ilmuwan politik telah meluncurkan pertanyaan-pertanyaan tentang demokrasi. *Modern democracies* karya James Bryce (1921) dan *Contitutional Government and Democracy* karya Carl.

Perhatian kepada demokrasi menyertakan isu-isu pemilihan umum dan legitimasi konstitusional ke dalam analisis politik. Lucian Pye (1965 dan 1966) menekankan pembangunan sebagai penguatan nilai-nilai dan praktek demokrasi kapitalis barat. Ia berpendapat adanya partisipasi pluralistik, sistem-sistem multi partai, dan politik persaingan maupun stabilitas politik dan penghindaran ketegangan yang berlebihan. Pembangunan demokrasi bagaimanapun juga harus diimbangi dengan pemerintahan yang kuat dan kewenangan teratur. Dalam hal ini Russel Fitzgibbon (1956) mengumpulkan opini-opini para spesialis Amerika Selatan dengan jumlah kriteria untuk mengukur demokrasi politik. Pertanyaan-pertanyaan berkisar pada derajat kebebasan pers, sifat-sifat sistem partai, kebiasaan memberikan suara, standar hidup dan sebagainya.

Dalil-dalil demokrasi ini terus-menerus merasuki konsepsi pembangunan politik. Upaya Almond (1965) untuk mengikat sistem-sistem ortodoks dan teori budaya pada pembangunan politik merupakan contoh tidak berubahnya pandangan terhadap kenyataan tersebut. Dalam *Aspects of Political Development*, Pye (1966 khususnya Bab 4) mengungkapkan bias-biasnya terhadap demokrasi barat sekaligus mengenali adanya keragaman defenisi, yang umumnya diasosiasikan dengan perubahan. Banyak penulis menemukan bahwa upaya-upaya untuk mengidentifikasi penjelasan pembangunan yang netral adalah bersifat statis, dan ini menjadi perhatian diletakkan pada perubahan. C.S. Whitaker, Jr (1967) merujuk pada "Dielektika Perubahan Pembangunan" dan Lewis A. Coser (1957) menekankan "Konflik Sosial" dalam suatu teori perubahan. Robert A. Nisbet (1969) memberikan sintesis teori-teori perubahan dan pembangunan di abad kesembilan belas dan kedua puluh. Dudley Seers (1977) mendefenisikan pembangunan dalam kebutuhan dasar manusia.

Kontribusi Leonard Binder, James S. Coleman, Joseph Lapalombara, Lucian Pye, Sidney Verba dan Myron Wiener (Binder, 1971). Studi-studi mereka diterbitkan dalam seri terakhir dari tujuh volume pembangunan politik. Konsepsi mereka berpusat pada "sindrom pembangunan" atau tiga dimensi sistem politik-pembedaan, kesetaraan dan kapasitas. Pembedaan merujuk pada "proses pemisahan progresif dan spesialisasi peran-peran, cakupan institusional, dan asosiasi dalam masyarakat". Kesetaraan berhubungan dengan "kewarganegaraan nasional, orde legal universal, dan norma kemajuan". Kapasitas melibatkan bagaimana pemerintah mengelola ketegangan-ketegangan dan merangsang ketegangan baru. Ketika pemerintah berkembang lewat peningkatan pembedaan, krisis kesetaraan dan kapasitas dapat terjadi: krisis identitas, legitimasi, partisipasi, penetrasi dan distribusi.

Krisis identitas berhubungan dengan budaya masa dan elit dalam pengertian perasaan nasional mengenai wilayah, pembelahan yang menggerogoti kesatuan nasional dan konflik antar loyalitas etnik dengan

komitmen nasional. Krisis legitimasi tumbuh karena perbedaan-perbedaan mengenai kewenangan. Krisis partisipasi adalah “sebuah konflik yang terjadi ketika elit yang memerintah memandang permintaan dan perilaku-perilaku individu dan kelompok yang mencoba berpartisipasi dalam sistem politik sebagai tidak berlegitimasi” (Binder, 1971:187). Krisis penetrasi dicirikan oleh “tekanan kepada elit yang memerintah untuk membuat adaptasi atau inovasi institusional dengan keragaman tertentu. Krisis distribusi dianalisis dalam pengertian masalah-masalah seperti ideologi, sumber daya fisik dan manusia, serta lingkungan institusional.

Kesselman berpendapat bahwa meskipun Binder dan para koleganya mampu melampaui asumsi-asumsi luas bahwa pluralisme, stabilitas politik, dan berakhirnya ideologi, tak pelak lagi mencirikan pembangunan, mereka menekankan perubahan dan krisis namun tidak memberikan penjelasan yang memuaskan menyangkut dinamika perubahan dengan ketiadaan teori perubahan struktural, perubahan tampaknya terjadi secara acak, tak dapat dijelaskan dan ahistoris” (Kesselman, 1973:184-189).

B. Pembangunan dan Nasionalisme

Pembangunan seringkali diasosiasikan dengan nasionalisme, dan akhir-akhir ini hubungan tersebut ditekankan dengan merujuk negara-negara yang sedang bangkit di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Kebanyakan sejarawan mencatat lahirnya nasionalisme ketika berlangsungnya Revolusi Perancis, meskipun nasionalisme diasosiasikan dengan masyarakat-masyarakat primitif atau terpendam dalam negara-kota, desa-desa lokal, atau wilayah tertentu (Snyder, 1964). Beberapa penulis mengakarkan nasionalisme pada Inggris di pertengahan abad ketujuh belas dimana institusi-institusi baru bermunculan seperti parlemen, kepentingan sipil, dan simbol-simbol nasional baru. Nasionalisme klasik, meskipun demikian, dipacu oleh revolusi Perancis maupun ekspansi Eropa Napoleon. Menurut Carlton J.H Hayes dan Louis L. Snyder, melalui itulah nasionalisme berkembang melalui empat periode sejarah: tahun 1815-1871, ketika kebangkitan nasionalisme dan kapitalisme mempersatukan negara-negara yang sebelumnya feodal; tahun 1871-1900, ketika nasionalisme menempa Jerman dan Italia serta mendorong bangsa-bangsa lain menyerukan kemerdekaan atas dasar kesatuan geografi, bahasa dan budaya; 1900-1918, di mana imperialisme disamakan dengan supranasionalisme; dan 1918 – sekarang ketika nasionalisme menentang imperialisme dan kolonialisme dengan formasi negara-negara baru.

Ilmuan sosial telah menyarankan sebuah klasifikasi nasionalisme, dan setidaknya teridentifikasi sembilan tipe nasionalisme dalam literatur umum. Nasionalisme pribumi diasosiasikan dengan organisasi-organisasi primitif dan kedukuan, yang berukuran kecil namun homogen dan dipegang bersama-

sama lewat suatu sistem keyakinan dan praktek yang membentuk loyalitas dan kepasrahan para anggota individu terhadap “negara” mereka. Nasionalisme tradisional, lebih memilih pemeliharaan aristokrasi, menjunjung tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Nasionalisme relegius atau simbolik, dicirikan oleh simbol-simbol bermuatan emosi, dan dalam bentuk sekulernya. Nasionalisme humaniter muncul dari pemikiran abad kesembilan belas dan serupa dengan nasionalisme tradisional, ia menjanjikan pembebasan dari kejahatan-kejahatan masa kini hingga melenium mendatang, menggantikan hal-hal natural dengan supranatural ilmu dengan teologi.

Nasionalisme liberal juga berasal dari abad kesembilanbelas, menekankan demokrasi politik, nilai-nilai kemanusiaan, dan kebebasan individu yang sangat longgar maupun patriotisme dan kedaulatan negara sebagai basis-basis utama kepentingan nasional atas dasar konstitusi negara. Nasionalisme integral menolak liberalisme, menegaskan kepatuhan patriotik, memusuhi pengaruh asing, dan mengagungkan negara sebagai batu pijakan menuju sebuah tatanan baru. Nasionalisme borjuis diekspresikan dalam bentuk-bentuk lama dan baru, varian lama didukung oleh kelas-kelas menengah dan profesional yang mengakui kesatuan nasional serta liberalisme politik dan ekonomi. Nasionalisme teknologi dapat disaksikan di negara-negara industri dimana kemajuan didorong melalui perencanaan terpusat dan pembangunan. Nasionalisme jakobin atau radikal diidentifikasi lewat pergerakan pembebasan kontemporer, ia mendesak setralisasi politik dan ekonomi dengan penuh disiplin, kedaulatan rakyat, kebebasan, dan kesetaraan maupun penyandaran pada kekuasaan untuk memperoleh tujuan-tujuan akhir (Chilkote, 1969).

Dengan demikian, nasionalisme memberikan suatu implus idiologi bagi seluruh pembangunan politik, sosial, budaya dan psikologis. Meskipun beberapa nasionalisme mungkin lebih efektif dari pada yang lain dalam merangsang pembangunan nasional, terhadap asumsi yang berlaku di seluruh literatur: semakin kuat nasionalisme, semakin besar peluang munculnya permintaan dan tindakan bagi keterlibatan dalam kehidupan nasional; permintaan dan tindakan ini mungkin membawa pada perubahan dan perkembangan.

C. Modernisasi Politik.

Menurut S.N Eisentand (1964) mengidentifikasi ciri-ciri struktural utama modernisasi mengikuti jalur yang disarankan Weber dan Persons. Ia mengasosiasikan modernisasi dengan suatu struktur politik dengan tingkat perbedaan yang tinggi serta penyebaran kekuasaan dan kewenangan politik ke seluruh belahan masyarakat. Marlon J. Levy, Jr. (1966) yang dikenal

dengan kerangka kerja fungsional-struktural neo-personianya dalam *The Structure of Society* (1952).

Setelah perang dunia kedua, kepentingan negara-negara kapitalis barat terhadap negara-negara baru tidak hanya berfokus pada keuntungan, ekstradisi bahan mentah, dan pasar-pasar baru, namun juga pada asumsi bahwa dampingan keuangan dan teknis yang masif akan mentransformasi masyarakat pertanian subsistem menjadi masyarakat industri modern. Pendukung paling berpengaruh dari teori ini adalah Sejarawan Ekonomi Amerika Serikat, Walt W. Rostow, dalam *Stages of Economic Growth: Anon Comonitist Manifesto* memberikan garis besar lima tahap: (1) masyarakat tradisional, (2) prakondisi untuk tinggal landas, (3) tinggal landas, (4) bergerak menuju kematangan, (5) zaman konsumsi masal tingkat tinggi.

A.F.K. Organski menguji peran pemerintah melalui empat tahap dalam karyanya *Stages of Political Development* (1965): 1. Penyatuan nasional primitive, 2. industrialisasi, 3. kesejahteraan nasional, 4. kelimpahan organski mendefinisikan pembangunan politik dalam pengertian meningkatnya efisiensi pemerintah dalam memobilisasi manusia dan sumberdaya materil menuju tujuan-tujuan akhir nasional. C.E. Blank (1966) menggambarkan fase-fase modernisasi dalam upaya menghindari implikasi-implikasi tak linier dan evolusi tahap yang bersifat terlalu menyederhanakan. Ia merujuk kriteria yang menyediakan fasilitas yang menyediakan fase-fase seperti (1) tantangan modernisasi masyarakat tradisional, (2) konsolidasi kepemimpinan modern ketika arti penting para pemimpin tradisional menurun, (3) transformasi ekonomi dan masyarakat dari pedesaan dan agraris menjadi perkotaan dan industri, dan (4) integrasi masyarakat.

Samuel P. Huntington (1965 dan 1968) meletakkan penekanan pada stabilitas dalam menghadapi pesatnya perubahan sosial dan ekonomi yang mengiringi modernisasi. Modernisasi mengisyaratkan industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas sosial, dan partisipasi politik. Huntington berfokus pada isu peluruhan politik (*political decay*). Peluruhan politik adalah cerminan ketidakstabilan, korupsi, tindakan otoriter dan kekerasan, serta sebagai hasil kegagalan pembangunan, yang didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas untuk melestarikan kelangsungan transformasi yang diperlukan akibat tantangan modernisasi dan tuntutan perluasan partisipasi. Dalam *Political Order In Changing Societies* (1968), Huntington mengungkapkan satu penekanan pada perubahan kandungan. Fundamental pemahaman pembangunannya secara esensial bersifat konservatif, bersandar pada nilai-nilai stabilitas, orde, keseimbangan dan harmoni.

Dalam karya berikutnya Huntington dan Nelson (1976) menguji partisipasi dalam hubungannya dengan lima model pembangunan. Model liberal, yang dapat disaksikan pada masyarakat Amerika Serikat, berasumsi

bahwa modernisasi dan pembangunan akan memajukan kondisi-kondisi material masyarakat dan mengoreksi ketidaksetaraan, kekerasan dan kurangnya partisipasi masyarakat terbelakang. Model ini bagaimanapun juga, “telah menunjukkan bahwa secara metodologi lemah, seara empiris patut dipertanyakan, dan secara historis tidak relevan” (Huntington dan Nelson, 1876:20). Model pembangunan borjuis memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan politik suatu kelas menengah yang sedang tumbuh, dimana tuntutan-tuntutan berpusat pada pertumbuhan ekonomi dan perkotaan dan pengembangan intansi-intansi pemilihan umum dan legislatif. Dalam model otokrasi, kewenangan pemerintah dapat mempergunakan kekuasaan negara untuk menekan partisipasi kelas menengah dan mengamankan dukungan kelas-kelas yang lebih rendah. Model pembangunan tenokratis dicirikan oleh rendahnya partisipasi politik dan tingginya investasi asing, partisipasi dibatasi demi pembangunan ekonomi dan perbaikan ketidakmerataan pendapatan. Model populis menekankan tingginya partisipasi politik maupun pemerataan ekonomi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Huntington dan Nelson menerapkan model-model ini pada dua fase pembangunan, yang pertama dimana pembangunan ekonomi bermula serta ketidakmerataan ekonomi muncul, dan yang lain fase dimana kelas-kelas sosial mulai menuntut akses bagi partisipasi dan kekuatan politik.

David After (1965) menyajikan sebuah tipologi pemerintahan dan teori perubahan. Pendekatan bergerak menuju bentuk analisis kebutuhan fungsional-struktural yang lebih berdaya terap, sesuai bagi analisis politik, mengikuti tradisi yang pertama kalinya diasosiasikan dengan Talcott Persons. After membedakan pembangunan dan modernisasi. Pembangunan, secara umum, merupakan hasil pertumbuhan dan integrasi peran-peran fungsional dalam sebuah komunitas. Modernisasi adalah satu kasus khusus dalam pembangunan. Modernisasi menyiratkan tiga kondisi sebuah sistem sosial yang dapat secara konstan menemukan hal-hal baru tanpa tercerai-cerai, terbedakan, struktur-struktur yang fleksibel, dan suatu kerangka kerja sosial untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat hidup dalam dunia dengan kemajuan teknologi. Industrialisasi, sebuah aspek khusus modernisasi, dapat dikatakan sebagai periode dalam sebuah masyarakat di mana peran-peran fungsional strategis dihubungkan dengan proses manufaktur (1965: 67).

After percaya bahwa sistem rekonsiliasi akan membawa pada “nilai-nilai kesempurnaan” (*consummatori*) dan ada pencarian kemanusiaan dengan pengucilan individu. “Setelah kehilangan basis reegiasnya, masyarakat kita terancam menjadi sebuah sistem penjarah yang terorganisasi dimana makna hanya diturunkan dari perolehan pridi, keterlibatan sekedar pemenjaraan anarki, dan dimensi konsep kemanusiaan tidak lebih dari sekedar nilai fungsional individu” (After, 1965:426).

Di sisi lain, ia berasumsi bahwa sistem rekonsiliasi akan memetik keuntungan dari ilmu dan ilmu tersebutlah yang akan membangkitkan kembali demokrasi. “Etika ilmiah didasarkan pada kebutuhan pertukaran bebas antara pengetahuan dan informasi. Ini diperlukan terutama dalam masyarakat yang sedang menjalankan modernisasi, dimana, meskipun jumlah kecil, para ilmuan, para ilmuwan sosial, dan para teknisi merupakan pendorong modernisasi” (1965: 436). After menggambarkan etika ilmiah ini dalam pengertian rasionalitas dan riset empiris. “Semangat ilmiah adalah basis sebuah idiologi yang mendorong bentuk identitas bagi mereka yang menganutnya dan bentuk solidaritas bagi anggota masyarakat di tengah-tengah perubahan”.

D. Keterbelakangan

Andre Gunder Frank dan beberapa ilmuan yang mencoba merumuskan sebuah teori keterbelakangan di dalam konteks marxis. Frank (1966) membedakan pusat dan batas luar dengan merujuk pada metropole dan satelit. Ia berpendapat bahwa teori pembangunan yang memadai tidak dapat di rumuskan tanpa mendapatkan perhatian terhadap sejarah ekonomi dan sosial masa lalu sebagaimana diderita mayoritas penduduk dunia. Frank mengajukan sejumlah dalil. Pertama, keterbelakangan bukanlah bersifat asli atau tradisional. Keterbelakangan kontemporer merupakan konsekuensi hubungan-hubungan antara negara-negara metropolitan yang sekarang ini maju dengan negara-negara satelit terbelakang, sebuah pencerminan perkembangan sistem kapitalis pada skala dunia. Kedua, pandangan dualisme masyarakat yang satu modern, kapitalis, dan maju sedangkan yang lain terisolasi, feodal atau prakapitalis, dan keterbelakangan adalah keliru karena keterbelakangan wilayah-wilayah adalah produk proses histori perkembangan kapitalis yang sama, yang membentuk pembangunan wilayah-wilayah progresif Ketiga, hubungan-hubungan metropole-satelit ditemukan pada tingkat internasional maupun dalam kehidupan-kehidupan ekonomi, politik, dan sosial dikoloni-koloni dan negara-negara neo-kolonial. Serangkaian metropol dan satelit menghubungkan seluruh bagian-bagian sistem dunia dari pusat metropolitan Eropa atau Amerika Serikat ke batas luar berupa negara-negara miskin. Keempat, saat-saat perang dan depresi dan depresi memungkinkan terjadinya beberapa perkembangan kapitalis otonom di satelitsatelit, namun dalam sistem, kapitalis seperti sekarang, perkembangan semacam ini ditakdirkan menghasilkan keterbelakangan. Kelima, daerah-daerah paling belakang adalah mereka di masa lalu memiliki ikatan paling erat dengan metropole.

Teori ketidakmerataan pembangunan mengakui beragamnya pola-pola transisi kapitalisme luar dan kapitalisme pusat sebagai konsekuensi dari dampak model produksi kapitalis dan mekanisme perdagangannya pada

formasi-formasi prakapitalis, yang menghasilkan, misalnya, penghancuran seni kerajinan tanpa digantikan oleh produksi industri lokal. Negara-negara belakang jangan dirancukan dengan negara-negara maju pada tahap pembangunan mereka lebih awal, karena negara terbelakang dicirikan oleh ketidakseimbangan distribusi produksi yang ekstrim, yang utamanya melayani kebutuhan pusat yang dominan. Di batas luar, keterbelakangan ditonjolkan dan pertumbuhan dihalangi, menjadi pembangunan otonomi tidak dimungkinkan.

Apapun perbedaan perbedaan asal-usul mereka, formasi batas tepi kesemuanya cenderung berkonvergensi dengan satu model tertentu, dicirikan oleh dominasi modal pertanian dan modal komersial tambahan (comprador). Dominasi modal pusat atas sistem secara utuh, dan mekanisme-mekanisme vital akumulasi primitif demi keuntungannya sendiri yang mengekspresikan dominasi ini, mewajibkan pembangunan kapitalisme nasionalisme batas luar harus dibatasi secara ketat, yang pada akhirnya akan bergantung pada hubungan-hubungan politik. Keadaan komunitas nasional batas luar yang dibuat cacat ini memberikan beban nyata dan fungsi-fungsi khusus kepada birokrasi lokal yang tidak sama dengan yang diterima kelompok-kelompok sosial birokratis dan tenokratis di pusat. Kontradiksi-kontradiksi yang khas ditemui dalam pembangunan keterbelakangan, dan kebangkitan strata borjuis kecil yang mencerminkan kontradiksi-kontradiksi tersebut, menjelaskan kecenderungan sekarang menuju kapitalisme negara. Jalur perkembangan kapitalisme yang baru di batas luar ini bukanlah merupakan model transisi menuju sosialisme melainkan ekpresi bentuk masa depan dimana hubungan baru akan diorganisasikan oleh pusat dan batas luar (Amin, 1976:202-203).

Terdapat dua isu yang muncul dalam pembahasan ketidakmerataan secara teoritis. Satu, pernyataan menyangkut pembangunan nasional dan internasional. Amin lebih condong kepada interpretasi yang melihat kapitalisme sebagai sebuah sistem dunia di mana intentitas nasional mungkin bergantung padanya. Kelas, produksi, perjuangan dan transisi kesemuanya harus dianalisis dalam konteks dunia. Dengan demikian, transisi kapitalisme ke sosialisme harus pada tatanan internasional, dan itu dimulai di batas luar. Isu yang kedua, adalah perdebatan menyangkut apakah analisis perlu memperhatikan pertukaran atau produksi. Para penulis seperti Emanuel dan Frank menekankan pertukaran dan ketidakmerataan pasar, sementara Amin tampaknya menggunakan konsep-konsep seperti metode produksi untuk bergerak melampaui kategori-kategori pasar sambil berfokus pada sistem dunia, pusat, dan batas tepi. Amin mengikuti tradisi Marx yang mencatat bahwa krisis dibangkitkan oleh siklus keuangan dan perdagangan dalam sistem kapitalis, namun juga berfokus pada perkembangan kapasitas produksi (termasuk teknologi dan akumulasi sumberdaya), yang akan menciptakan kondisi-kondisi, mungkin terdorong oleh krisis-krisis pertukaran ini,

membawa pada perubahan. Perbedaan antara produksi dan pertukaran ini telah menyulut perdebatan asal-usul kapitalisme dan transisi dari feodalisme menuju kapitalisme.

Gagasan-gagasan ketidakseimbangan pembangunan sebagian merupakan tanggapan terhadap gagasan evolusi dan gradualisme abad kesembilanbelas, yang diasosiasikan dengan para pendukung kemajuan kapitalis, yang memegang pendapat bahwa seluruh masyarakat aktif akan bangkit dari negara prakapitalis menuju sebuah dunia kapitalis borjuis dan persaingan bebas. Peristiwa abad kedupuluh telah menunjukkan akibat-akibat akumulatif pembangunan kapitalis dunia dan mewujudkan ketidakteraturan yang ekstrim, karena perdagangan, perbankan dan industri kapitalis terkonsentrasi di Eropa Barat dan Amerika Serikat, sementara mayoritas umat manusia terpaksa berada dalam kondisi-kondisi yang menyedihkan.

Sifat-sifat ketidakseimbangan dan keterpaduan dari pembangunan secara tepat digambarkan oleh George Novack. Untuk ketidakseimbangan pembangunan, dorongan utama kemajuan manusia adalah kendali manusia atas kekuatan-kekuatan produksi. Ketika sejarah bergerak maju, terjadi pertumbuhan kekuatan-kekuatan produksi yang lebih tepat atau lebih lambat di berbagai segmen masyarakat berdasarkan perbedaan produksi-produksi alami dan hubungan sejarah-sejarahnya. Perbedaan ini mencirikan perkembangannya atau menyusutkan keseluruhan zaman-zaman sejarah dan menanamkan bermacam-macam laju dan batas-batas pertumbuhan pada beragam masyarakat, beragam cabang ekonomi, beragam kelas, beragam institusi sosial dan bidang budaya. Inilah esensi ketidakmerataan pembangunan (Novack, 1966:5).

Variasi-variasi di tengah berbagai faktor sejarah ini menjadi basis kebangkitan fenomena luar biasa di mana sifat-sifat tahap pembangunan sosial yang lebih rendah menjadi satu dengan yang lebih tinggi. Keterpaduan formasi-formasi ini memiliki ciri yang sangat kontradiktif dan menunjukkan keanehan-keanehan mencolok. Mereka mungkin menyimpang dari aturan dan mengakibatkan suatu gejolak yang menghasilkan lompatan kualitatif evolusi sosial dan memungkinkan masyarakat yang sebelumnya terbelakang untuk mendahului, dan setelah waktu tertentu, menjadi lebih maju. Inilah makna inti hukum keterpaduan pembangunan (Novack, 1966:61).

Dalam sebuah analisis fase awal revolusi Rusia, Lenin meletakkan keberhasilan peristiwa-peristiwa revolusioner berkat “rangkaiannya sejarah yang tidak biasa di mana mereka terpadukan, dalam bentuk yang sangat “menguntungkan”, pergerakan-pergerakan yang sama sekali tidak serupa, kepentingan kelas yang sama sekali berbeda, kecenderungan-kecenderungan sosial dan politik yang sama sekali berlawanan” (Novack, 1966:7).

E. Ketergantungan Ekonomi

Perspektif-perspektif ketergantungan kontemporer mengungkapkan bentuk-bentuk dominasi dan ketergantungan yang berlawanan di antara negara-negara dunia kapitalis. Kapitalis mungkin bersifat progresif atau regresif. Negara-negara dependen mungkin berkembang sebagai cerminan ekspansi negara-negara dominan atau terbelakang sebagai konsekuensi hubungan-hubungan ketergantungan mereka.

Dengan ketergantungan kita mengartikan sebuah situasi di mana ekonomi negara-negara tertentu terkondisikan oleh perkembangan dan ekspansi ekonomi lain yang menjadi tempat bergantung negara-negara tadi. Hubungan saling ketergantungan antara dua atau lebih ekonomi, dan antara ekonomi-ekonomi ini dengan perdagangan dunia, mengambil bentuk ketergantungan sementara beberapa negara (yang dominan) dapat melakukannya hanya sebagai pencerminan ekspansi, yang bisa memiliki pengaruh positif ataupun negatif bagi perkembangan langsung mereka (Dos Santos, 1970:231).

Mereka yang menerapkan ketergantungan dalam analisis pembangunan dan keterbelakangan seringkali berfokus pada masalah penetrasi asing ke dalam ekonomi politik dunia ketiga. Pengaruh-pengaruh politik dan ekonomi luar ikut menentukan pembangunan lokal dan memperkuat kelas penguasa dengan ketergantungan kelas-kelas marginal. Ekonom Chili, Osvaldo Sunkel, memperlas interpretasi ini.

Faktor faktor asing tidak hanya dilihat sebagai hal-hal eksternal melainkan intriksi pada sistem, dengan macam-macam sebab politik, keuangan, ekonomi, teknis budaya yang terkadang tersembunyi dan terselubung di dalam negara terbelakang. Dengan demikian konsep “ketergantungan” secara internasional menghubungkan evolusi kapitalisme paska perang dengan sifat-sifat diskriminatif proses pembangunan lokal, sebagaimana kita ketahui. Akses terhadap proses-proses dan keuntungan-keuntungan pembangunan bersifat selektif, bukan menyebarkannya, proses ini cenderung memastikan adanya akumulasi keistimewaan berpenguatan diri (*self reinforcing*) bagi kelompok-kelompok khusus maupun kelanjutan keberadaan suatu kelas marginal (Sunkel, 1972:519).

F. Klasifikasi Teori Ketergantungan

Cardoso menguji tiga kecenderungan dalam literatur ketergantungan. Pertama, pembangunan nasional otonom, yang memunculkan dirinya di Brazil dan tempat-tempat lain sebagai tanggapan terhadap luasnya keyakinan pembangunan akan terjadi melalui ekspor komoditas atau investasi asing. Tiga alternatif dihadapi oleh negara-negara terbelakang: ketergantungan, otonomi, revolusi. Dalam perjuangan untuk menghapus hambatan-hambatan

pembangunan nasional, ketergantungan dapat distasi melalui otonomi dan perubahan.

Bacha mengajukan lima konsep ketergantungan. Yang pertama, berasal dari upaya Thomas Vasconi (1969) untuk membedakan pembangunan dari keterbelakangan lewat analisis pusat dan batas luar sebagai bagian-bagian yang saling bergantung dari sistem kapitalis mendunia. Konsep kedua, berasal dari karya imperialisme Lenin. Dalam konsepsi inilah dependenistas menemukan pijakan teorinya, karena menurut Bacha, Lenin mampu memadukan kekuatan-kekuatan internal dan eksternal dalam suatu interpretasi pengalaman sebuah negara dependen.

Pandangan ketiga, tumbuh dari karya Andre Gunder Frank (1967) yang menganalisis struktur metropolis-satelit dan kotradiksi-kontradiksi internal sistem kapitalis. Perspektif keempat, hubungan dengan Dos Santos (1968) dan “ketergantungan baru” juga dikenal sebagai ketergantungan industri teknologi. Berkebalikan dengan ketergantungan kolonial, yang didasarkan ekspor perdagangan, dan ketergantungan industri keuangan, yang dicirikan oleh modal besar dalam pusat-pusat hegemoni di penghujung abad kesembilanbelas, ketergantungan baru merupakan fenomena terakhir, didasarkan pada perusahaan multi nasional korporasi, yang setelah perang dunia kedua perinvestasi dalam perluasan industri-industri yang strategis digerakkan oleh pasar internal negara-negara terbelakang belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

Philip O'Brien menunjukkan tiga tradisi berbeda dalam teori ketergantungan. Yang pertama, berkembang dari perspektif strukturalis *Economic Commission For Latin America (ECLA)*, di bawah ekonom Argentina Raul Prebisch, yang berpendapat bahwa Amerika Latin harus memasang hambatan tarif yang tinggi dan membangun industri-industri nasional untuk menggantikan meningkatnya permintaan atas produksi-produksi luar negeri. Dipercayai bahwa kebijakan substitusi impor akan mendatangkan ekonomi yang dapat dikontrol secara lokal, menggerogoti kelas-kelas penguasa tradisional, dan merangsang pembangunan nasional serta kebangkitan sebuah negara modern. Kedua, tradisi ketergantungan melekat kerangka kerja marxis. Ketiga, sintesis strukturalis-marx.

Sintesis teori ketergantungan dari Chilcote membedakan model ketergantungan dari model penyebaran. Berikut model ketergantungan dari Chilcote. Chilcote memberikan empat perumusan: pertama, pembangunan keterbelakangan, mengikuti pemikiran Frank. Kedua, ketergantungan baru, dalam naungan argument Dos Santos. Ketiga, ketergantungan dan pembangunan, ditarik dari pemikiran Corsodo bahwa pembangunan kapitalis dependen telah menjadi bentuk baru ekspansi monopolistic di dunia ketiga.

G. Pendekatan Terhadap Teori Ketergantungan

Desarrollista, Strukturalis, Otonomi Pembangunan Nasional sejak masa kolonial, Amerika Latin bergantung pada ekspor bahan-bahan mentah dan komoditas-komoditas pertanian dalam mengejar pembangunan, namun strategi *desarollo* atau pembangunan kearah luar ini digerogeti oleh menurunnya pendapat ekspor selama depresi tahun 1930-an. Di bawah ECLA, strategi berubah menjadi *desarollo* kearah dalam. Strategi baru ini didalilkan pada pencapaian otonomi nasional melauai kontrol negara dan perencanaan ekonomi politik di bawah kaum terpelajar borjuis kecil dan borjuis industri. Pendekatan ECLA didasarkan pada pernyataan esensial. Yang pertama adalah bahwa negara-negara berkembang terstruktur menjadi masyarakat ganda (*dual society*), yang satu maju dan modern dan yang lain terbelakang dan feudal. Di bawah negara kapitalis dan tumbuhnya otonomi kepentingan-kepentingan nasional, insfrastuktur jalan, pembangkit tenaga dan hal-hal esensial lainnya dapat dibangun untuk memastikan jalur menuju industrialisasi seperti Brazil dan Argentina.

Sunkel sepakat bahwa pembangunan keterbelakangan adalah dua muka dari proses universal yang sama dan bahwa ekspresi geografisnya ditranslasikan ke dalam dua popularitas besar: di satu sisi poplaritas dunia antara negara-negara industri metropolitan yang maju dan negara-negara dependen batas luar yang terbelakang; dan di sisi lain, popularitas negara-negara dalam pengartian kelompok-kelompok dan kegiatan-kegiatan terbelakang, primitive, marjinal dan dependen (Sunkel, dikutip dalam P.O'Brien).

Sunkel tampaknya berasumsi bahwa keterbelakangan adalah bagian dari proses pembangunan kapitalis dunia, bahwa perwujudan keterbelakangan adalah wajar. Ia melihat sebuah kompleks struktur-struktur, yang diikat oleh hukum-hukum dan membentuk suatu sistem yang dipengaruhi perubahan. Perubahan di dalam sebuah struktur dapat diidentifikasi ketika seorang berhubungan bagian-bagiannya dengan sistem secara utuh.

Kondisi-kondisi kolonialisme tradisional yang sama, menurut Sunkel, ditemukan secara internal dalam negara-negara sekarang ini. Kondisi-kondisi ini termasuk monopoli dan ketergantungan (metropolis mendominasi komoditas-komoditas terisolasi, menciptakan deformasi ekonomi lokal dan kapitalisasi); hubungan-hubungan produksi dan kontrol sosial (eksploitasi menjarah tanah dan melakukan diskriminasi di mana-mana); serta standar hidup dan budaya (ekonomi subsistem menekankan adanya kemiskinan, teknik-teknik terbelakang, produktivitas yang rendah, kurangnya pelayanan). Inilah kondisi kaum marjinal yang menderita karena rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan pengangguran semu, serta kurangnya makanan. Orang-orang macam ini merasa perasaan kalah dan fatalisme yang

serupa dengan yang dialami orang-orang daerah koloni. Gonzales Cassanova percaya bahwa kondisi-kondisi eksternal tidak lagi memiliki dampak besar terhadap Meksiko, sehingga memungkinkan terdapatnya solusi nasional. Ini terjadi ketika kaum marjinal diasimilasikan kedalam masyarakat kolektif melalui kaum borjuis nasional. Akibatnya, perlawanan dapat dipusatkan terhadap kapitalisme monopoli dan eksploitasi kapitalis.

Sebuah turunan dari kolonialisme internal adalah teori kutub-kutub pembangunan, yang pertama kalinya diajukan oleh ekonom Perancis Francois Perroux (1968) dan diperluas oleh ahli geografi Brazil Manuel Correia de Andrade (1967). Andrade secara khusus terlibat dengan ketidakmerataan pembangunan, yang dipercayainya dapat disaksikan di antara negara-negara maupun di antara wilayah-wilayah dalam sebuah negara.

Teori ini berasumsi bahwa ekonomi-ekonomi terbelakang dicirikan oleh kurangnya infrastruktur transportasi dan komunikasi; oleh ekonomi ganda, dengan wilayah-wilayah maju hadir di antara wilayah-wilayah subsisten dan oleh ketergantungan terhadap keputusan-keputusan eksternal yang berhubungan dengan produksi barang-barang primer. Kondisi-kondisi ini mungkin dapat diatasi lewat penyebaran modal dan teknologi ke pusat-pusat wilayah terbelakang yang menjanjikan potensi industrialisasi. Dengan perencanaan yang cermat, keseimbangan ekonomi dapat tercapai, menghasilkan pembangunan otonom.

Fernando Henrique Cardoso menyatakan gagasan bahwa kapitalisme mendorong keterbelakangan. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa pembangunan kapitalis dapat terjadi dalam situasi-situasi dependen. Cardoso percaya bahwa pembangunan kapitalis dependen telah menjadi bentuk baru dari ekspansi monopolistik di dunia ketiga. Oleh sebab itu pembangunan berlangsung dalam ketergantungan baru. Pembangunan ini menguntungkan kelas yang berasosiasi dengan modal internasional, termasuk petani lokal, kaum borjuis komersial, keuangan, dan industri bahkan kelas pekerja yang bergerak dalam sektor internasional, seperti para wiraswasta lokal. Konsekuensinya adalah perpecahan kepentingan ke dalam dualisme struktural di antara mereka yang termarginalisasi olehnya.

Cardoso mempertahankan pendekatannya dengan menunjukkan bahwa kapitalisme dan imperialisme modern berbeda dengan konsepsi-konsepsi Lenin sebelumnya. Akumulasi modal sebagian besar merupakan konsekuensi perusahaan-perusahaan multinasional ketimbang kontrol keuangan, dan intervensi telah berpindah dari bahan-bahan mentah dan pertanian industri. Terlebih lagi, trend-trend baru kapitalisme internasional menghasilkan suatu peningkatan saling ketergantungan dalam kegiatan-kegiatan produksi di tingkat internasional dan modifikasi pola-pola ketergantungan membatasi kebijakan pembangunan di negara-negara batas

luar dalam kapitalis internasional. Carsodo setuju bahwa kapitalisme internasional telah mempengaruhi industri kawasan-kawasan pinggir secara tidak proporsional, namun ia menemukan bahwa asumsi kurangnya pertumbuhan ekonomi-ekonomi dependen diakibatkan oleh imperialisme adalah menyesatkan (Carsodo, 1972:94).

Johan Galtung (1971) memberikan suatu teori imperialisme struktural yang menerima sambutan luas di kalangan non-marxis. Pendapatnya menentang dorongan “reduksionis” pandangan Lenin bahwa imperialisme merupakan akibat meluasnya kekuatan ekonomi di bawah kapitalisme, sebaliknya, ia memahami imperialisme sebagai suatu hubungan struktural antar berbagai kolektivitas. “imperialisme adalah sebuah sistem yang memisahkan kolektivitas-kolektivitas dan menghubungkan beberapa bagian satu sama lain dengan hubungan harmoni kepentingan, dan bagian-bagian lain dengan hubungan disharmoni kepentingan, atau konflik kepentingan” (Galtung 1971: 81). Kolektivitas-kolektivitas dapat berupa negara-negara pusat dan batas luar, dan setiap negara pada gilirannya dapat memiliki pusat dan batas luarnya sendiri. Imperialisme didefinisikan dalam pengertian sejumlah hubungan antara pusat dan batas luar. Disharmoni hadir pada wilayah-wilayah batas luar negara pusat ataupun negara batas luar (1971:83). Hubungan satu negara batas luar dengan negara pusat dicirikan oleh ketergantungan.

Galtung memberikan garis beberapa dimensi dan pengaruh hubungan tersebut dan mengaitkannya dengan lima tipe imperialisme; (1) ekonomi, di mana cara-cara produksi baru berkembang di pusat dan tidak ada yang berkembang di batas luar; (2) politik, di mana terdapat penguatan posisi, berturut-turut, di pusat dan batas luar; (3) militer, ditandai oleh produksi cara-cara penghancuran di pusat, dan tidak langsung di batas luar; (4) komunikasi, dengan mudah terbangun di pusat dan tidak terbangun di batas luar; dan (5) budaya, tercermin dalam pendidikan dan pelatihan sehingga suatu perasaan swadaya dan otonomi merasuk di pusat sementara perasaan ketergantungan melanda batas luar. Galtung selanjutnya mengidentifikasi fase-fase imperialisme. Konsep-konsepnya diterapkan pada dua negara, kemudian tiga negara dan tiga kelas (termasuk kelas menengah). Variabel-variabel diuji secara kualitatif dan kuantitatif, serta sejumlah strategi perubahan dan pembangunan ditawarkan.

Pendekatan Galtung mendefinisikan pengertian-pengertian, mengidentifikasi hubungan-hubungan antara pusat dan batas luar. Kemudian menguji data untuk tes generalisasi dan hipotesis. Pendekatan semacam ini bersifat statis dalam penyandarannya pada kategori-kategori deskriptif. Perpecahan satu gagasan imperialisme tunggal menjadi beragam tipe cenderung menetralkan pengertian, merampas arti penting teoritisnya, dan mengenyampingkan penekanan dorongan ekonominya. Meskipun demikian,

pendekatan tersebut mengikuti tradisi ilmu politik ortodoks, dengan penyandaran pada abstraksi-abstraksi dan deskripsi-deskripsi kabur yang memberikan sedikit potensi analisis.

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan (*options*) dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia.

Simpulan

Salah satu perkembangan dalam ilmu politik adalah munculnya studi pembangunan politik sebagai bidang kajian tersendiri, disamping bidang kajian lainnya seperti : 1. Teori-teori politik, 2. Lembaga-lembaga politik, 3. Partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, 4. Hubungan internasional. Para sarjana barat mengembangkan kajian ini dalam usaha mereka memahami perubahan sosial politik di negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu, konteks pembangunan politik cenderung ditujukan pada negara-negara sedang berkembang dengan asumsi bahwa di negara-negara tersebut belum berjalan rasionalisasi, integrasi dan demokratisasi.

Menurut Huntington dan Dominguez konsep pembangunan politik dikatakan mempunyai konotasi secara geografis, deveriatif, teologis dan fungsional: 1. Pembangunan politik dalam konotasi geografis berarti terjadi proses perubahan politik pada negara-negara sedang berkembang dengan menggunakan konsep-konsep dan metoda yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, seperti konsep mengenai sosialisasi politik, komunikasi politik dan sebagainya. 2. Pembangunan politik dalam arti derivative dimaksudkan bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh, yakni modernisasi yang membawa konsekuensi pada pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek-aspek lainnya. 3. Pembangunan politik dalam arti teologis dimaksudkan sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik. Tujuan-tujuan itu misalnya mengenai stabilitas politik, integrasi politik,

demokrasi, partisipasi, mobilisasi dan sebagainya. Juga termasuk didalamnya tujuan pembangunan suatu bangsa meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan, demokrasi, stabilitas dan otonomi nasional. Pembangunan politik dalam makna fungsional diartikan sebagai suatu gerakan perubahan menuju kepada suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik demokrasi konstitusional.

Pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)” yang tidak pernah tuntas dalam berbagai dimensi pembangunan bagi kesejahteraan rakyat.

Analisis dalam kerangka Pembangunan Politik di negara-negara pasca kolonial yang pada umumnya cenderung non demokratis, dalam kerangka menciptakan “*State and Nation Building*” yang kokoh. Dengan memadukan berbagai pendekatan/teori yang relevan termasuk di dalamnya peranan regim militer dalam pemerintahan yang dianggap tidak demokratis.

Daftar Pustaka

Chilcote, Ronald H. *Theories of Comparative Politics The Search for a Freedom*. Colorado. Westview Press Bolder. 1981.

Frank, Andre Gunder. *The Development of Underdevelopment*. New York. Monthly Review Press. 1966.

Huntington, Samuel P. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge. Harvard University Press. 1976.

Kautsky, Karl. *The Dictatorship of The Proletariat*. Ann Arbor. University of Michigan. 1964.

Richard A. Higgott, *Political Development Theory*, This Edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005.